

LAPORAN UJI PETIK

TRIWULAN III

OSP-5 PROVINSI NTT

2019



PENDAHULUAN

A. Kemajuan kegiatan KOTAKU

Rancangan program KOTAKU berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping.

1. untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu Sistem pemantauan dan evaluasi (monev).
2. Dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan KOTAKU yang saat ini sedang memasuki tahap penyiapan kegiatan infrastruktur skala lingkungan.

Program Kota Tanpa Kumuh untuk tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan di 9 Kabupaten/kota yang tersebar di 130 kelurahan/desa dengan Karakteristik Lokasi Sasaran Program Kotaku :

- a. Level Kota :
 - Kota Kumuh Infra Skala Kota : di 1 Kota
 - Kota Kumuh Non Infra Skala Kota tersebar di 8 kabupaten dengan 21 kelurahan/desa
- b. Level kelurahan/desa :
 - Kel/Desa Kumuh Di Kota Skala Kota : terdapat di 1 kota dan mendapatkan alokasi BPM tahun 2019 sebanyak 2 kelurahan
 - Kel/Desa Kumuh di Non Kota Infra Skala Kota: terdapat di 3 kabupaten dengan alokasi BPM tahun 2019 sebanyak 5 kelurahan.
 - Kel/Desa Non Kumuh : yang bukan lokasi kumuh tersebar di 75 kelurahan/desa.
- c. Uji Petik Tematik

Osp 5 Prov. NTT memiliki total Luas Kumuh 302,61 Ha (Flag 1 dan Flag 2) target pengurangan kumuh tahun 2018 seluas 124,5 dan capaian pengurangan kumuh hingga tahun 2018 seluas 283,88 Ha dan menyisahkan 32,02 Ha yang harus tertangani di tahun 2019 ini dan berdasarkan hasil simulasi sementara capaian pengurangan kumuh seluas 287,46 Ha, dan masih menyisahkan 15,15 Ha.

Dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan KOTAKU tahun 2019 ini maka salah satu upaya yang dilakukan dengan pemantauan secara langsung dengan metode uji petik/spot check dan lokasi yang menjadi sampling dari kelurahan penerima dana BPM. Adapun lokasi Uji petik untuk triwulan 3 ini pada tahap pemanfaatan BPM di 7 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil monitoring maupun uji petik pelaksanaan/pemanfaatan dana BPM masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan yang harus ditindaklanjuti oleh KSM, BKM di bulan berikutnya.

Adapun yang menjadi realisasi terhadap target pelaksanaan uji petik untuk Tim OSP-5 NTT tidak dapat tercapai dikarenakan pendanaan sesuai kontrak tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi yang berada di kabupaten Sumba Barat, Kab. Sumba Timur dan 4 Kabupaten yang ada di Pulau Flores. Namun untuk Lokasi Kumuh di Lokasi Prioritas tercapai 100%.

B. Tujuan uji petik

Untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, dalam konteks pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh maka uji petik akan difokuskan untuk mengukur :

- Kualitas dukungan input peningkatan kapasitas, monev, pengelolaan SIM, PIM
- Kualitas/ berfungsinya output dalam kegiatan penanganan kumuh
- Mengidentifikasi persoalan dan kendala yang terjadi di lapangan.

C. Rekapitulasi Lokasi uji petik

No	Pelaksana	Lokasi Uji Petik	Jumlah Kelurahan BPM	Target Kelurahan		Waktu Kunjungan		
				BPM	Non BPM	Juli	Agustus	September
1	OSP 5 NTT	Kupang	2	2	40	31 July 2019	30 August 2019	27 September 2019
		TTS			2			25 September 2019
2	Tim Korkot	Belu	1	1			29 August 2019	
		Sumba Barat	3	3				19 September 2019
		Sumba Timur	1	1				18 September 2019

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Disajikan dalam bentuk table. Pengelompokan topik mengacu pada instrument ataupun matriks analisis.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Akses informasi dan Akuntabilitas	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	Capaian substansi output dan outcome. Temuan positif : a. Seluruh lokasi uji petik telah melakukan audit tahunan LKM TB 2018 dan opini sudah terbit dengan hasil UO b. PKM tahun 2019 untuk seluruh lokasi uji petik telah dilaksanakan 100% sesuai dengan	a. Ketaatan terhadap pedoman/aturan b. Pemahaman Pendamping terhadap siklus cukup baik c. Dukungan dari aparat level kelurahan dan masyarakat terhadap Program cukup baik d. Masih kurang pemahaman bagaimana untuk menggalang kolaborasi	a. Melakukan Penguatan terhadap Forum Kolaborasi

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN 3
OSP-5 PROV. NTT

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<p>ketentuan dan LPJ 100%</p> <p>c. Telah dilakukan penilaian kinerja kelembagaan LKM Semester 1 tahun 2019</p> <p>Temuan negative :</p> <p>a. Forum Kolaborasi yang sudah terbentuk belum berjalan</p>	diberbagai unsur	
2	Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	<p>Temuan positif :</p> <p>1. RPLP menjadi salah satu acuan dalam Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan.</p> <p>Temuan negative :</p> <p>1. Ada beberapa tidak ada data perencanaan untuk Kolaborasi tahun 2019</p>	Adanya kesepakatan dan pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan dari muatan dok RPLP dan menjadi acuan untuk penanganan kumuh	1. Agar melakukan identifikasi potensi kolaborasi melalui data investasi RPLP dengan OPD atau melalui CSR
3	Kinerja kelembagaan	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	<p>Temuan positif :</p> <p>1. PPO BKM Semestaer 1 telah dilaksanakan di seluruh lokasi Uji petik</p> <p>2. Minimal Kinerja BKM Mandiri</p> <p>Temuan negative :</p> <p>1. Rencana Kerja dari sebagian KPP tidak berjalan secara optimal</p> <p>2. Masih adanya beberapa anggota BKM yang tidak aktif</p>	1. Pemahaman dari KPP masih minim tentang bagaimana pengelolaan dan administrasinya	<p>1. Agar melakukan peningkatan kapasitas terhadap KPP</p> <p>2. Melakukan pengecekan daftar list</p>
4	Tertib / Kelengkapan Administrasi	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 Baik, 1 tidak memadai	<p>Temuan positif :</p> <p>1. Dokumen Perencanaan teknis telah disetujui sesuai ketentuan</p> <p>2. Telah ditandatangani SPK LKM dengan PPK</p> <p>3. Sebagian lokasi dimana Pemberkasan BPM sudah disusun LKM dengan lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan</p>	<p>1. Kurang disiplin dalam mengadministrasikan pertanggungjawaban KSM</p> <p>2.</p>	<p>1. Tim Faskel/KSM Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) KSM/Panitia (Form-RPD) setiap tahap pencairan dan dibuatkan peritem.</p> <p>2. Nota-Nota harus terinci sesuai jenis pekerjaan bukan gelondongan agar mempermudah dalam membuat Buku bantu DKIS (Daftar Kegiatan Infrastruktur dan</p>

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN 3
OSP-5 PROV. NTT

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<p>4. Penanganan Dampak sudah selesai (clean and clear)</p> <p>Temuan negative :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat secara glondongan 2. Nota tidak terincikan peritem kegiatan 		Swadaya) sehingga dapat di rincikan penggunaan dana per item kegiatan dalam KSM
5	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	<p>Temuan positif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan teknis lengkap dan telah terverifikasi b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Skala Lingkungan ada dan Lengkap <p>Temuan negative : -</p>	1. Pemahaman terkait dengan perencanaan teknis yang harus tersusun dan terverifikasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur	
6	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	<p>Temuan positif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume kegiatan sesuai dengan Volume yang direncanakan. 2. Cara pelaksanaan setiap pekerjaan memenuhi persyaratan cara kerja sesuai standar teknis/RKS <p>Temuan negative :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada yang menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis/RKS 2. Untuk pelaksanaan pekerjaan MCK yang sedang melakukan pekerjaan pondasi, KSM dan tukang tidak memiliki gambar kerja rencana jaringan air bersih dan air kotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada KSM yang tidak mengacu kepada perencanaan yang ada sudah ada, sehingga masih ada yang menggunakan material yang tidak sesuai 2. Adanya kurang control dari pendamping dalam melakukan pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan MCK harus dilengkapi dengan gambar kerja rencana jaringan air bersih dan air kotor. Sehingga KSM dan tukang dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik secara estetika dan fisual, ekonomis dan hemat waktu 2. Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM khusus matrial pasir agar menggunakan pasir yang tidak berlumpur
7	Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1	<p>Temuan positif :</p> <p>Dokumen pengelolaan dampak lingkungan tersedia termasuk dokumen kesiapan lahan (Ijin Pakai/Ijin dilalui.</p>	Tim Fasilitator sudah memahami akan pentingnya pengelolaan pengelolaan dampak lingkungan dan kesiapan lahan dari masyarakat.	1. Agar KSM dapat diarahkan agar bangunan yang dibuat harus memberikan untuk disabilitas

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
	lingkungan dan dampak sosial	Baik	Temuan negative : 1. infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum mempertimbangkan terhadap aspek gender		
8	KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	Dari 7 lokasi Uji Petik dan Monitoring 5 lokasi memadai, 1 tidak memadai, 1 Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP ada dan memiliki struktur organisasi 2. Sebagian ada sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan 3. Pengelolaan Infrastruk ada beberapa yang KPP yang berjalan dan berfungsi Temuan negative : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan pengetahuan teknis tentang bagaimana melakukan pemeliharaan sebagian anggota KPP masih kurang termasuk dari segi administrasi pengelolaannya 2. Sebagian hasil pelaksanaan infrastruktur tahun 2017 tidak berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap infrastruk yang terbangun masih kurang sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas 2. Masih kurangnya koordinasi yang baik dengan semua pihak dalam melakukan pemeliharaan 3. Masyarakat belum paham bagaimana mekanisme pengelolaan terhadap infrastruktur yang terbangun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pelatihan/Coaching terkait administrasi untuk Tim KPP secara mandiri dari Tim Faskel (MK,INFRA,CD) dan sosialisasi berjenjang oleh tim fasilitator sehingga Infrastruktur yang sudah dibangun dapat dikembangkan/ditingkatkan dengan swadaya masyarakat dan kolaborasi

